

**PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
OLEH DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KBP3A) DALAM
MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SEJAHTERA
(Studi Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran)**

Kiki Endah¹, Windu Abdul Kholiq²

¹⁾²⁾Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Galuh

ABSTRAK

Kampung KB merupakan program dalam mengatasi masalah kependudukan dan hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan pemerintah yaitu Nawacita yang di dengungkan oleh Presiden Jokowi dimana membangun Indonesia mulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Menurut Badan Pusat Statistika pada tahun 2017 penduduk Indonesia mencapai 261 juta jiwa dan menempati urutan keempat penduduk terbanyak di dunia. Jawa Barat salah satu provinsi penyumbang angka kepadatan paling tinggi di Indonesia dimana pada tahun 2017 jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 48 juta jiwa atau 18,34 persen dari total populasi Indonesia. Dan diperkirakan akan bertambah pada tahun 2035 mencapai 57 juta jiwa atau 18.69 persen (BPS,2017). kurang kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kualitas hidup keluarga dan masyarakat penyumbang angka kepadatan penduduk dan bisa berdampak pada kemiskinan, keterbelakangan dan kesehatan yang rendah. Kemudian kurang terbinanya hubungan yang erat antara pemerintah dan masyarakat salah satu penyebab belum menurunnya angka kepadatan penduduk. Program Kampung KB merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam upaya memecahkan masalah tersebut. Tetapi pelaksanaan kampung KB di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih belum berjalan dengan optimal dimana masih kurang pembinaan peserta di kampung KB oleh Dinas KBP3A, masih kurangnya Sumber daya manusia sehingga berimbas pada minimnya pelaporan perkembangan kampung KB serta masih kurang aktifnya masyarakat dalam mengelola kampung KB. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melihat indikator keberhasilan program Kampung KB yaitu 1) indikator input,2) indikator proses dan 3) indikator output.

Kata Kunci: Program Kampung KB, Dinas KBP3A, Masyarakat, Sejahtera.

A. PENDAHULUAN sebanyak 3 juta jiwa pertahun. Menurut survey demografi kesehatan Indonesia penduduk Indonesia memiliki laju pertumbuhan mencapai 1,38% atau tahun 2017 bahwa total kelahiran

menunjukkan sebesar 2,4% hal ini berarti angka kelahiran belum dapat ditekan dan berimbas pada kepadatan penduduk yang terus mengalami peningkatan. Menurut Badan Pusat Statistika pada tahun 2017 penduduk Indonesia mencapai 261 juta jiwa dan menempati urutan keempat penduduk terbanyak di dunia. Jawa Barat salah satu provinsi penyumbang angka kepadatan paling tinggi di Indonesia dimana pada tahun 2017 jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 48 juta jiwa atau 18,34 persen dari total populasi Indonesia. Dan diperkirakan akan bertambah pada tahun 2035 mencapai 57 juta jiwa atau 18.69 persen (BPS,2017). Pertumbuhan laju penduduk yang terus bertambah akan dapat memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap keberadaan sebuah Negara. Dimana pengaruh buruk bisa dari segi ekonomi dan juga kesehatan masyarakat. Karena diketahui bahwa masyarakat tidak semua dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar keluarga. Kampung KB sebagai program kependudukan, KB dan pembangunan Keluarga yang memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara dalam mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Dimana dengan dibentuknya kampung KB maka pelibatan masyarakat untuk dapat berdaya guna dan berperan nyata dalam pembangunan bisa terlaksana sesuai dengan cita-cita dari pemerintah dimana pembangunan di mulai dari

pinggiran dengan memprioritaskan daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI (Nawacita Ke-3). Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan serta menganalisis Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KBP3A) Dalam Upaya Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Sejahtera. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah memberikan masukan bagi pihak terkait atau pemerintah daerah khususnya Dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar melakukan pembinaan lebih intensif dalam pengelolaan kampung KB, dan dinas lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan KB dalam mewujudkan kehidupan masyarakat lebih sejahtera. Keluarga berencana Strategi yang ditetapkan oleh pemerintah dan bangsa Indonesia yaitu menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, rata dan terjangkau, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menegaskan bahwa keberhasilan dalam mewujudkan

pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga menyatakan bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas hidup yang mencakup semua aspek kehidupan yang berhubungan dengan kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Bukan hanya untuk golongan tertentu saja, tetapi kemakmuran dan kesejahteraan untuk semua golongan. Peningkatan kualitas hidup masyarakat diantaranya dapat diwujudkan dengan pelaksanaan program KB.

Saat ini Pemerintah sedang berupaya merevitalisasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga agar program ini dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh para keluarga dan masyarakat. Salah satunya melalui program Kampung KB, yang dikembangkan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat khususnya mereka yang berada di wilayah pinggiran, miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil, Daerah Aliran Sungai, dan wilayah nelayan di seluruh tanah air.

Selain itu, Kampung KB dikembangkan sebagai strategi untuk mendukung Nawacita yang merupakan prioritas pembangunan nasional, khususnya Cita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memprioritaskan daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI (Nawacita Ke-3).

Kampung KB merupakan salah satu kegiatan prioritas yang sesuai dengan instruksi Presiden, terutama sebagai bentuk investasi Program KB yang manfaatnya dapat secara langsung diterima oleh masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan langkah koordinasi lintas sektor, terutama dalam integrasi kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB.

Menurut buku Pedoman Kampung KB (2017:3) menyatakan bahwa pembangunan keluarga sejahtera maknanya identik dengan pengentasan kemiskinan, karena tujuannya sama meningkatkan derajat kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat. Secara sederhana keluarga itu akan sejahtera, apabila bebannya

tidak berat, ekonominya kuat, dan ketahanannya mantap.

Selanjutnya menurut buku Pedoman Kampung KB (2017:3) menyatakan bahwa program pembangunan keluarga yang terakumulasi dalam KKBPK dengan empat pokok garapan yaitu pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pemantapan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga serta ditambah dengan pengendalian, pemantauan, pengamatan serta pembinaan penduduk merupakan bagian dari pengentasan kemiskinan.

Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBPK secara utuh di lini lapangan. Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, *stakeholders* instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi kampung KB) di seluruh kabupaten dan kota.

Pembentukan Kampung KB di Kabupaten Pangandaran ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 476/Kpts. 161-Huk.Org/2016 tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berencana Dusun

Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang bertujuan untuk menunjang keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) tingkat Desa di Kabupaten Pangandaran dan untuk kesinambungan peran masyarakat sebagai kekuatan penggerak pembangunan penduduk dan keluarga, perlu menetapkan lokasi kampung keluarga berencana sebagai sasaran pembangunan program.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas hidup yang mencakup semua aspek kehidupan yang berhubungan dengan kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Bukan hanya untuk golongan tertentu saja, tetapi kemakmuran dan kesejahteraan untuk semua golongan. Peningkatan kualitas hidup diantaranya dapat diwujudkan dengan adanya program kampung KB.

Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa Pelaksanaan Program Kampung KB oleh Dinas KBP3A dalam mewujudkan kehidupan masyarakat sejahtera di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal dimana terlihat masih kurang pembinaan peserta di kampung KB oleh Dinas KBP3A, masih kurang Sumber daya manusia sehingga berimbas pada minimnya pelaporan perkembangan kampung KB serta

masih kurang aktifnya masyarakat dalam ikut mengelola kampung KB,

Upaya ini tentunya membutuhkan sinergitas peran antara Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A), UPTD KBP3A, dan dinas-dinas serta sektor terkait lainnya yang bergerak dalam memberikan dukungan untuk kampung KB agar dapat lebih baik dari sisi kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakatnya sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Keluarga.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimana Pelaksanaan Program Kampung KB oleh Dinas KBP3A dalam mewujudkan kehidupan masyarakat sejahtera di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran .

B. KAJIAN PUSTAKA

Kampung Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu upaya yang difokuskan untuk pengembangan yang berawal dari tingkat paling rendah yaitu desa atau kampung. Kampung KB juga dirancang sebagai upaya pendekatan akses pelayanan Keluarga Berencana kepada keluarga kecil di desa atau kampung dalam aktualisasi 8 fungsi keluarga yaitu: fungsi agama, fungsi sosialisasi/pendidikan,, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan, fungsi kasih sayang, fungsi sosial budaya maupun pembinaan lingkungan. Kampung KB

dibangun berada pada tingkat RW atau dusun dengan menggunakan pendekatan budaya masing-masing daerah.

Menurut Pedoman Pengelolaan Kampung KB (2017:13) menyatakan bahwa Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB merupakan salah satu model pelaksanaan total program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta merupakan program strategis dalam upaya percepatan agenda program pembangunan khususnya pada daerah pinggiran.

Adanya kampung KB memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. Selain itu, kampung KB juga meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang

kesehatan dan hak-hak reproduksi, meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL), meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung serta meningkatkan taraf kehidupan dan kualitas masyarakat pada wilayah kampung KB melalui berbagai kegiatan lintas sektor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Kampung KB memiliki sasaran tersendiri diantaranya adalah keluarga yang beranggotakan balita, remaja dan lansia, wanita usia subur, pasangan usia subur, remaja, posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta organisasi sosial kemasyarakatan. Kriteria keluarga yang menjadi sasaran utama adalah kampung yang memiliki jumlah keluarga miskin Pra Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I diatas rata-rata tingkat desa. Serta jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat Desa.

Selanjutnya dalam pedoman Pengelolaan Kampung KB (2017:40) dinyatakan bahwa indikator keberhasilan program Kampung KB adalah sebagai berikut :

a. Indikator Input

1. Tingginya Partisipasi seluruh potensi Kampung untuk kemajuan Kampung KB.
2. Beragamnya kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu

baik program pemerintah maupun inovasi masyarakat.

3. Besarnya sumber anggaran Kampung KB yang didapat baik dari iuran masyarakat, bantuan pemerintah maupun donatur yang tidak mengikat.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana.

b. Indikator Proses

1. Berjalannya kegiatan dimasing-masing seksi.
2. Peran serta petugas Pemerintah dalam sinkronisasi kegiatan.
3. Peran serta institusi masyarakat dalam pengelolaan Kampung KB.
4. Menjalankan 8 (delapan) fungsi keluarga dilaksanakan disetiap keluarga.
5. Frekuensi dan kualitas kegiatan KIE/Penyuluhan.
6. Frekuensi pelayanan KB-KR.
7. Frekuensi pelayanan dari sektor lainnya.
8. Frekuensi pertemuan berkala kelompok-kelompok kegiatan (baik program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluargamaupun kegiatan sektor terkait di Kampung KB).
9. Frekuensi kegiatan gerakan masyarakat Kampung KB.

c. Indikator Output

Keberhasilan kampung KB dapat diukur dari pelaksanaan 8 fungsi di masing-masing keluarga yaitu :

1. Meningkatnya pelaksanaan keagamaan (Keluarga semakin rajin beribadah).
2. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat baik ilmu pengetahuan maupun profesionalisme (semakin banyak orang yang memiliki keterampilan untuk meningkatkan usaha).
3. Tercapainya rata-rata dua anak setiap keluarga, keluarga sehat, anak tumbuh dan berkembang dengan baik.
4. Meningkatnya *income* per kapita keluarga dan pemanfaatannya menunjang kepentingan keluarga.
5. Terlindunginya masyarakat/keluarga dan hidup tentram dan nyaman.
6. Semakin terjalinnya hubungan harmonis antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
7. Semakin berkembangnya budi pekerti, tata krama dan seni budaya baik di keluarga maupun masyarakat sekampung.
8. Semakin tertatanya lingkungan yang serasi selaras dan seimbang antara perilaku dan lingkungan.

Dengan demikian kampung KB dibentuk sebagai salah satu upaya penguatan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dikelola dan

diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sehingga dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan, dan di evaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, Lexy. J, 2011:5) menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud untuk menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Kampung KB oleh Dinas KBP3A dalam mewujudkan kehidupan masyarakat sejahtera di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dengan aspek kajian meliputi indikator keberhasilan program Kampung KB menurut pedoman Pengelolaan Kampung KB (2017: 40)

Data primer dalam penelitian dilakukan dengan wawancara secara langsung terhadap informan yang

mengetahui langsung dan terlibat dalam program kampung KB.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Kampung KB oleh Dinas KBP3A dalam mewujudkan kehidupan masyarakat sejahtera di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran diketahui hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Program Kampung KB oleh Dinas KBP3A dalam mewujudkan kehidupan masyarakat sejahtera di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih kurang terlaksana dengan optimal sesuai dengan indikator keberhasilan program Kampung KB pada pedoman Pengelolaan Kampung KB (2017: 40). Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa indikator kurang terlaksana dengan baik seperti pemahaman masyarakat masih kurang terhadap keberadaan Kampung KB yang menyebabkan kurang dapat berdaya guna masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada di desa sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang belum memadai jumlahnya sehingga menyebabkan pelaksanaan program Kampung KB belum terlaksana dengan baik dan seksi-seksi kurang membantu mensosialisasikan program Kampung KB kepada masyarakat, masih kurang SDM dalam mengelola kampung KB.

Untuk lebih jelasnya penulis melakukan pembahasan hasil penelitian sebagai berikut :

a. Indikator Input yang antara lain :

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa indikator input sebagai indikator keberhasilan program KB di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih kurang partisipasi dari masyarakat dalam mengelola potensi kampung untuk kemajuan Kampung KB dan kurang beragamnya kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu baik program pemerintah maupun inovasi masyarakat dan kurangnya besarnya sumber anggaran Kampung KB yang didapat baik dari iuran masyarakat, bantuan pemerintah maupun donatur yang tidak mengikat serta kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana. Sehingga menyebabkan belum dapat merubah kualitas hidup masyarakat kearah yang lebih sejahtera.

b. Indikator Proses

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa indikator proses sebagai indikator keberhasilan program KB di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih kurang berjalannya kegiatan di masing-masing seksi serta kurangnya peran serta petugas Pemerintah dalam sinkronisasi kegiatan dan kurangnya peran serta institusi masyarakat dalam pengelolaan Kampung KB sehingga setiap keluarga belum dapat menjalankan 8 (delapan) fungsi keluarga yang disebabkan masih kurangnya frekuensi dan kualitas

kegiatan KIE/Penyuluhan dan kurangnya frekuensi pelayanan KB-KR serta kurangnya frekuensi pertemuan berkala kelompok-kelompok kegiatan (baik program KKBPK maupun kegiatan sektor terkait di Kampung KB).

Dalam fase pelaksanaan ini perlu dilakukan konsultasi dengan sebanyak mungkin individu dan kelompok untuk menjamin seluruh aspek dari pengukuran telah terhubung sehingga dapat berjalan dengan baik. Proses ini dapat dilakukan dengan melakukan briefing (penjelasan singkat) ataupun dengan pelatihan.

Berjalannya kegiatan di masing-masing seksi karena kurangnya dukungan semua pihak seperti peran serta petugas pemerintah dalam sinkronisasi kegiatan dalam pengelolaan Kampung KB dalam menjalankan 8 (delapan) fungsi keluarga.

c. Indikator Output

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa indikator output sebagai indikator keberhasilan program KB di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih kurang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat baik ilmu pengetahuan maupun profesionalisme, masih kurang meningkatnya *income* per kapita keluarga dan pemanfaatannya menunjang kepentingan keluarga serta kurang terlindunginya masyarakat/keluarga dan hidup tenang dan nyaman. Kemudian dengan masih

kurangnya sumber daya manusia petugas lapangan sehingga sosialisasi, pembinaan, pengelolaan bagi masyarakat kampung KB masih kurang dilakukan. Sehingga masih ada masyarakat yang belum begitu memahami dan menjalankan segala kegiatan yang sudah disusun oleh petugas dari Dinas KBP3A terlaksana.

Kampung KB belum dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga program KB belum dapat dievaluasi dengan baik BKKBN (2016:22), proses pembentukan suatu wilayah akan dijadikan sebagai lokasi Kampung KB perlu memperhatikan prasyarat wajib yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Tersedianya data kependudukan yang akurat. Data ini bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data Potensi Desa dan data Catatan Sipil yang akan digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan disuatu wilayah Kampung KB secara berkesinambungan.
- b. Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah. Dukungan dan komitmen yang dimaksud adalah dukungan, komitmen dan peran aktif se luruh instansi/unitkerja pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang instansi

masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

- c. Partisipasi aktif masyarakat, partisipasi aktif masyarakat yang dimaksudkan adalah partisipasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di Kampung KB secara berkesinambungan guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat

Permasalahan kependudukan ini juga menjadi salah satu permasalahan serius sehingga data kependudukan harus akurat. Data ini bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data Potensi Desa dan data Catatan Sipil yang akan digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan disuatu wilayah Kampung KB secara berkesinambungan. Selain itu terkendala komitmen pemerintah daerah (pemda) untuk melanjutkannya. Pemerintah daerah atau pimpinan wilayah tersebut seringkali tidak bisa mempersatukan dinas-dinas terkait untuk menyelenggarakan kampung KB dan rendahnya partisipasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di Kampung KB secara berkesinambungan.

Adapun Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas KBP3A dalam pelaksanaan program kampung KB dalam mewujudkan kehidupan masyarakat sejahtera di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten

Pangandaran, yang antara lain sebagai berikut: 1) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggali seluruh potensi Kampung KB sehingga keberadaan potensi yang ada di desa belum dapat dikembangkan. 2) Kurangnya kesinambungan dalam melaksanakan kegiatan sehingga menyebabkan kurang mendapat dampak atau manfaat bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan suatu kegiatan kurang memperhatikan dampak dari pelaksanaan suatu kegiatann. 3) Kurangnya anggaran yang diberikan oleh masyarakat secara memadai serta kurangnya anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang belum memadai jumlahnya sehingga menyebabkan pelaksanaan program Kampung KB belum terlaksana dengan baik. 4) Kurangnya pengelola melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka memberikan penyuluhan KIE sehingga masih banyak pasangan usia subur yang belum menggunakan alat kontrasepsi yang dilakukan secara rutin kepada petugas.

- 1) Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program Kampung KB oleh Dinas KBP3A yaitu Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggali seluruh potensi Kampung KB sehingga keberadaan potensi yang ada di desa dapat dikembangkan.

- 2) Mengajak peran aktif semua elemen masyarakat untuk dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang beragam sehingga dapat dilaksanakan secara terpadu.
- 3) Meningkatkan anggaran yang diberikan oleh masyarakat secara memadai serta mengajukan tambahan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memadai jumlahnya sehingga pelaksanaan Program Kampung KB terlaksana dengan baik.
- 4) Pengelola secara rutin melakukan kunjungan kepada masyarakat kampung KB untuk melihat dan mengevaluasi peserta baik kesulitan dan membantu memberikan ketrampilan dan pelatihan untuk kesejahteraan masyarakat.

E. KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Kampung KB oleh Dinas KBP3A dalam mewujudkan kehidupan masyarakat sejahtera di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Kampung KB oleh Dinas KBP3A dalam mewujudkan kehidupan masyarakat sejahtera di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, kurang terlaksana dengan optimal sesuai dengan indikator keberhasilan program Kampung KB menurut

pedoman Pengelolaan Kampung KB (2017: 40). Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa indikator kurang terlaksana dengan baik seperti : pemahaman masyarakat masih kurang terhadap keberadaan kampung KB yang menyebabkan keberadaan potensi yang ada di desa belum dapat dikembangkan, anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang belum memadai jumlahnya sehingga menyebabkan pelaksanaan program kampung KB belum terlaksana dengan baik dan seksi-seksi kurang membantu mensosialisasikan program kampung KB kepada masyarakat.

2. Ada beberapa hambatan dalam Pelaksanaan Program Kampung KB oleh Dinas KBP3A dalam mewujudkan kehidupan masyarakat sejahtera di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, seperti pemahaman masyarakat terhadap keberadaan kampung KB, kurangnya anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memadai
3. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan Pelaksanaan Program Kampung KB oleh Dinas KBP3A dalam mewujudkan kehidupan masyarakat sejahtera di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan

kampung KB yang, mengusulkan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memadai sehingga pelaksanaan program kampung KB terlaksana dengan baik dan mengajak seksi-seksi membantu mensosialisasikan program kampung KB kepada masyarakat.

Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga

Peraturan Pemerintah Nomor 87
Tahun 2014 tentang
Perkembangan
Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga,
Keluarga Berencana, dan
Sistem Informasi Keluarga

F. DAFTAR PUSTAKA

BKKBN, 2006, *Buku Saku Bagi Petugas Lapangan Program KB Nasional Materi. Konseling*, Jakarta: BKKBN.

Handayani, Sri. 2010. *Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Pustaka Rihama.

Hartanto, Hanafi. 2004, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, Pustaka. Sinar Harapan, Jakarta.

Sebastian, 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan